KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kepastian Waktu Pindah Ibu Kota Negara lewat Perpres
Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kepastian Waktu Pindah Ibu Kota Negara lewat Perpres

PEMERINTAH perlu segera membuat aturan turunan pemindahan ibu kota negara, mulai peraturan presiden (perpres) hingga Peraturan Menteri (Permen). Aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru saja mendapatkan persetujuan pengesahan di DPR.

"Pada saat pembentukan undang-undang IKN kan nanti akan ada pengumuman dan ada perpres tentang kapan pindah dan kapan akan diumumkannya posisi ibu kota negara," jelas anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang IKN TB Hasanuddin, kemarin.

Ia juga mengatakan pemerintah akan membentuk badan atau lembaga otorita yang nantinya akan dipimpin kepala otorita. Penujukan kepala otorita untuk IKN baru bernama Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur itu sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

"Itu jadi urusan pemerintah biarkan pemerintah yang membuat kriteria calon kepala otorita dan biarkan sesuai dengan UU dalam hal ini presiden yang memutuskan siapa yang ditunjuk menjadi kepala otoritas," ungkap Hasanuddin.

Selain itu, pemerintah perlu mengatur kembali status keistimewaan Jakarta yang bukan lagi menjadi ibu kota negara. Kekhususan Jakarta sebagai daerah ibu kota akan dicabut dan berubah sepenuhnya menjadi provinsi.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Jakarta ke depan mampu menjadi pusat bisnis seperti New York. "Jakarta tetap istimewa nantinya yang memiliki kekhususan seperti Kota New York yang telah sukses sebagai pusat bisnis," ujarnya, kemarin.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, banyak negara hebat yang berhasil memisahkan antara kota yang akan dijadikan pusat pemerintahan dan pusat bisnis hingga akhirnya dapat fokus melaksanakan pembangunan. Selain New York, ia mencontohkan Turki yang telah memindahkan fokus pemerintahannya ke Kota Ankara dari Istanbul.

Di kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan pembangunan Nusantara bakal berimplikasi besar pada tujuan pemerataan kesejahteraan nasional.

Selama ini produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa dan Sumatra mendominasi hingga 80% PDB nasional, mulai era 1983 sampai 2018. "IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN," tandas Febrio. (Uta/Hld/Mir/P-2)